

# Ekonomi Liberal atau Sosialisme Religius?

**Rafiko**

Dosen Fakultas Tarbiyah

---

Prof. Dr. M. Dawam Rahadrjo, *Ekonomi Neo-Klasik dan Sosialisme Religius: Pragmatisme Pemikiran Ekonomi Politik Sjafruddin Prawiranegara* (Bandung: Mizan, 2008).

---

## A. Pendahuluan

“Ideologi sudah mati!”, demikian isi pesan pendek dari Ulil Abshar Abdalla sekitar 10 tahun yang lalu kepada seorang anggota *steering committee* acara ‘Membedah Wacana Islam Liberal’ di IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Pada awal millennium baru itu Ulil menjadi “artis”, tidak hanya membangkitkan isu lama tentang rasionalisasi dan liberalisasi pemikiran umat Islam yang sebelumnya didengungkan Harun Nasution dan Nurcholis Madjid, tetapi juga seruan untuk menghentikan penyeragaman keagamaan (Islam) di Indonesia. Jargon yang diusung Ulil dan beberapa kawannya di Kajian Islam Utan Kayu (KIUK) adalah “Islam Warna-Warni” atau “Warna-Warni Islam”. Meski ditentang oleh seorang Guru Besar di IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, acara ‘Membedah Wacana Islam Liberal’

tersebut tetap berlangsung. Pernyataan “ideologi sudah mati!” juga hangat diperdebatkan di kalangan panitia. Gerakan liberalisme Islam Ulil dan kawan-kawan bergeser dari Kelompok Kajian Utan Kayu di Jakarta menjadi Jaringan Islam Liberal (JIL) yang “merekrut” banyak akademisi dari seluruh Indonesia.

Lalu apa menariknya liberalisme Islam Ulil itu? Menariknya karena para liberalis apapun bidangnya berada dibawah payung liberalisme. Implementasi ideologi ini yang paling ketara adalah dalam bidang ekonomi yang pada saat sama di Indonesia pada awal millennium itu sedang mengalami kontra wacana dan kontra gerakan, dari persemaian wacana Ekonomi Islam atau Ekonomi Syariah. Artinya, di saat umat didorong oleh JIL untuk melepaskan “belunggu” pemahaman keagamaan yang dianggap tidak lagi kontekstual dengan zaman modern, ketika itu juga kesadaran untuk kembali kepada ajaran Islam yang *syumul* juga sedang mengalir. Islamisasi ekonomi yang dimulai Bank Muamalat Indonesia (BMI) tahun 1990 hingga kini terus menerabas masuk ke bank-bank konvensional. Beberapa lembaga perbankan milik taipan non muslim pun “dipaksa” melakukan rasionalisasi terhadap gejala anti ribawi oleh para pelanggannya. Anti riba berarti juga sikap menentang bunga yang menjadi sumber pendapatan utama bank-bank konvensional. Di titik inilah buku tentang pemikiran ekonomi Sjafruddin Prawinegara, teknokrat di era awal Republik, yang ditulis Dawam Rahadrjo menarik untuk diulas.

Dawam dan Sjafruddin sama-sama begawan sosial dan ekonomi. Sjafruddin berani mengatakan bahwa bunga bank yang rendah bukan termasuk riba (h. 23). Riba menurutnya tidak lain dan tidak bukan adalah sistem ekonomi eksploitatif oleh pemilik modal terhadap pekerja atau dalam kata lain adalah perdagangan (termasuk pinjam meminjam uang) yang bersifat menipu, memeras, mengambil keuntungan yang tinggi dan melemahkan pihak lain. Adakah Sjafruddin ini ulama? Apakah dia, selain menurut Dawam adalah seorang pluralis (h.23), juga bagian dari ekonom liberal? Tetapi mengapa dia menentang pihak yang mengambil keuntungan tinggi? Menengok ke era Sjafruddin dan melihat konteks hari ini,

sesungguhnya “ideologi” masih nyata dan masih terang benderang. Adalah kapitalisme, yang merupakan anak kandung liberalisme, terus menerus bermetamorfosis, menyebarkan sayapnya ke ranah politik dan sosial. Dawam memantik kita menggali siapa sebenarnya Sjafruddin dan apa saja gagasannya sembari mengira benarkah Sjafruddin, seperti kata Dawam, adalah bagian dari “jamaah” Sosialisme Religius Indonesia yang anti eksploitasi atau malah seorak liberalis seperti Ulil.

### **B. Siapa Dawam dan Siapa Sjafruddin?**

M. Dawam Rahadrjo yang lahir 20 April 1942 menurut Fachry Ali adalah pemuda borjuis yang “kemaruk” ilmu. Ia belajar secara otodidak bidang-bidang pengetahuan kemanusiaan: filsafat, sejarah, sastra, politik, agama dan ilmu-ilmu budaya, disamping secara formal belajar ekonomi moneter di Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada, Yogyakarta (h. 31). Ayahnya, Zuhdi Rahardjo, adalah guru sekolah Muhammadiyah di Solo yang hijrah menjadi peniaga batik. Selain tumbuh dari lingkungan kelas menengah, Dawam juga pernah mencicip program *American Field Service* (AFS) yang pasti mempengaruhi cara dia memandang jagad manusia ini, termasuk bagaimana “mereformasi” pemahaman umat Islam Indonesia. Dia pernah aktif di Pelajar Islam Indonesia (PII) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan terlibat aktif dalam gerakan masyarakat sipil (*civil society*). LP3ES, Lembaga Studi Pembangunan (LSP), Pusat Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF) serta ICMI adalah tempat persinggahannya dalam membantu pencerahan intelektual keIslaman dan gerakan masyarakat sipil Indonesia (h.33).

Dawam Rahadrjo mengenal Sjafruddin melalui Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Manajemen (LPPM) pada era kepemimpinan Dr. Anugerah Pekerti, seorang teman Katolik Dawam. LPPM didirikan oleh Sjafruddin bersama dengan Pastor Dr. Kadarman dan Dr. Anwar Harjono. Menariknya Dawam juga bercengkerama dengan Sjafruddin melalui Lembaga Islam untuk Penelitian dan Pengembangan Masyarakat (LIPPM), yang juga

menjadi irisan grup intelektual penyangga Partai Masyumi, partai yang kemudian menjadi orientasi politik Sjafruddin. Beberapa pertemuan dan rasa penasaran tentang Sjafruddin, sebagai seorang ekonom, nampaknya membuat Dawam semakin mengagumi Sjafruddin. Fachry Ali menengarai ada dua kemungkinan yang membuat Dawam memberi tempat istimewa bagi Sjafruddin dan menulis buku tentangnya: *pertama*, karena keduanya sama-sama beranggapan ada sistem ekonomi non pasar yang berharga dan harus mengoreksi akibat destruktif kapitalisme. *Kedua*, karena keduanya bergerak dan berpengalaman dalam aras gerakan masyarakat sipil. Dan, mungkin yang terpenting, mengikut Fachry Ali lagi, Dawam yang memiliki multi ilmu pengetahuan itu sama dengan Sjafruddin yang *homo Islamicus*, merefleksikan pemikiran ekonominya berdasarkan nilai-nilai keIslaman.

Sjafruddin sendiri lahir 1911. Ayahnya seorang priyayi dan birokrat Sunda dan ibunya seorang keturunan Minangkabau. Karena itu, menurut Dawam (h.65), Sjafruddin bisa dekat dengan dua tokoh awal Republik yang juga keturunan Minangkabau, Sjahrir (PSI) dan Mohammad Natsir (Partai Masyumi). Selain soal etnis, spirit gerakan Sjafruddin dekat kepada Sjahrir karena Sjafruddin juga aktivis di organisasi *Unitas Studiosorum Indonesiensis* (USI). USI adalah organisasi yang dibangun oleh para profesor konservatif Belanda dengan tujuan meredam gerakan politik para mahasiswa Indonesia di Belanda dan mengalihkannya kepada kecenderungan akademis (h. 62). Di USI ini, Sjahrir menjadi panutan dan kemudian alumni USI-lah yang kelak menjadi lingkaran Sjahrir di Partai Sosialis Indonesia (PSI) dan kabinetnya. Tamat dari *Recht Hogeschool* pada 1939 ia mendapat gelar *Meester in de Rechten* (Mr.) (h.68). Karir kerjanya dimulai menjadi birokrat di Kementerian Keuangan di masa Belanda dan Jepang. Awal kemerdekaan Sjafruddin terlibat dalam politik dengan menjadi sekretaris Komite Nasional Indonesia (KNI) dan lalu menjadi anggota KNIP (berfungsi sebagai badan legislatif). Setelah itu Sjafruddin menjadi pejabat tinggi dan pemimpin pemerintahan dalam berbagai kabinet. Sjafruddin pernah menjadi Menteri Muda Keuangan pada kabinet Sjahrir II dan

Menteri Keuangan pada kabinet Sjahrir III ketika ia sudah terlibat dalam partai Masyumi (h.66).

### C. Pemikiran Sjafruddin

Sjafruddin memilih bergabung dengan Partai Masyumi daripada PSI, setelah ia terlibat dengan USI, memang dipengaruhi beberapa faktor. Raden Arsyad Prawiraatmaja, ayahnya, dibesarkan dalam lingkungan pesantren Banten dan pernah menjadi anggota Sarekat Islam (SI). Dia bisa bergaul di kalangan santri dan juga abangan (h.69). Hal sama didapat Sjafruddin yang dapat bergaul di kalangan santri modernis maupun sosialis sekular. Secara keagamaan Sjafruddin membaca Al-Quran dari terjemahan Belanda yang disusun oleh cendekiawan Ahmadiyah, Soedewo (h.69). Bahkan, literatur Ahmadiyah, menurut Dawam, juga digunakan oleh Tjokroaminoto dan Soekarno. Literatur Ahmadiyah juga mempengaruhi Sjafruddin yang awalnya menganggap Islam hanya soal ruhiyah (h.70).

Sjafruddin membuat tulisan resmi pertama kali adalah untuk naskah pidatonya di radio tanggal 29 Oktober 1946 dalam kapasitas sebagai Menteri Keuangan dalam kabinet Sjahrir III. Pidato tersebut kemudian dimuat dalam surat kabar *Soeara Merdeka* yang terbit di Semarang. Isi tulisan itu utamanya adalah gagasan untuk menerbitkan mata uang sendiri yang diberi nama Oeang Repoeblik Indonesia (ORI) (h.68). Pada 30 Oktober 1946 ORI resmi menggantikan mata uang Jepang.

Gagasan Sjafruddin dalam bidang ekonomi menemui momentumnya ketika ia menjabat Menteri Keuangan dan dilanjutkan menjadi Gubernur Bank Sentral pada awal dekade 1950-an. Ada lima gagasan penting yang dikemukakannya: *pertama*, perlunya stabilitas moneter, baik internal maupun eksternal. *Kedua*, perlunya membangun sektor pertanian sebagai tulang punggung industrialisasi melalui minimal dua sektor: tanaman pangan untuk swasembada dan perkebunan untuk menghasilkan devisa. *Ketiga*, modal asing masih tetap perlu dipertahankan, bahkan harus terus diundang untuk industrialisasi Indonesia. *Keempat*, perlunya melakukan proses Indonesianisasi manajemen perusahaan-perusahaan asing. *Kelima*,

memberdayakan usaha kecil melalui kredit perbankan. *Keenam*, menempatkan Bank Sentral sebagai lembaga mandiri pendamping pemerintah yang bertugas memelihara stabilitas moneter dan nilai rupiah.

Setelah menancapkan enam gagasan itu yang juga menahbiskan dirinya menjadi salah satu peletak dasar ekonomi di Republik Indonesia, Sjafruddin Prawiranegara sebenarnya lebih kelihatan sebagai seorang ekonomi liberal pragmatis ketimbang Sosialis Religius. Dawam memang nampak “berjuang” menggolongkan Sjafruddin seorang Sosialis Religius dan menghubungkannya dengan Tjokroaminoto dan Sjahrir (h.75-76, 79-81) serta pembayangan sikap Sjafruddin tentang ekonomi Indonesia kontemporer dengan kata-kata “sekiranya Sjafruddin ditanya..” (h.205) atau kata “Sjafruddin barangkali...” (h.205) dan kata “..ia mungkin akan..” (h.207). Menurut pandangan Dawam, fikiran Sjafruddin dalam konteks Sosialisme Religius itu berada di buku kecil Sjafruddin yang berjudul “Politik dan Revolusi Kita” yang dibuat tahun 1948 (h.90). Walaupun tidak ada elaborasi Dawam lebih lanjut yang membuktikan di bagian mana fikiran Sjafruddin yang dianggap Sosialisme Religius dalam buku itu, atau esensi mana yang dapat melabelkan Sjafruddin sebagai seorang ekonom Sosialis, sebenarnya pemihakan Sjafruddin terhadap keadilan sosial, penentangan bunga tinggi (*minding*) dan pelabelan riba terhadap tindakan pengambilan keuntungan lebih oleh pemilik modal sudah cukup menjadi wakil dari fikiran-fikiran yang coba mensintesa semangat Sosialisme dan Islam. Sintesa ini memang sudah dilakukan sebelumnya oleh sang guru para pemimpin awal Republik Indonesia dan tokoh Sarekat Islam, Haji Oemar Said Tjokroaminoto. Apapun, di atas kekaburan status Sjafruddin apakah sebagai Ekonom Liberal atau pendukung Sosialisme Religius, sikap beliau jelas menolak penindasan manusia atas manusia lainnya dan penimbunan keuntungan oleh pemilik modal, telah menjadi ciri sikap anti kapitalisme.

## **D. Penutup**

Pandangan Sjafruddin memang masih boleh dielaborasi lebih dalam, terutama berkaitan dengan bidang ekonomi dimana dia terlibat langsung sebagai praktisi dan pengambil kebijakan. Bekas Gubernur Bank Indonesia di awal Republik ini umpamanya juga banyak membuat tulisan yang menghubungkan ekonomi dan Islam. Salah satu tulisannya yang mungkin membuka peluang perdebatan lebih luas adalah pada era Orde Baru dalam makalah ceramah untuk Forum Korps Mubaligh Indonesia tahun 1987 berjudul "Aspirasi Islam dan Penyalurannya". Sjafruddin dalam makalah tersebut menyetujui pendapat bahwa Islam adalah agama akhlak yang berada di tengah-tengah antara Yahudi yang merupakan agama hukum dan Kristen yang merupakan agama kebatinan (h.203). Untuk pendapat ini, Dawam menyebut bahwa Sjafruddin adalah penganut Islam substantive bukan Islam formal yang menginginkan negara Islam. Apapun, Sjafruddin adalah aktor penting pemancang tonggak Ekonomi Indonesia sekaligus aktor "pemberontakan" Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia tahun 1958 di Sumatera Barat. Aktor yang masih perlu digali lebih dalam posisi berfikirnya dalam kancah perjalanan Republik.